
STRATEGI PENGELOLAAN RUMPON SEBAGAI ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN

Oleh

Bahtiar Hamar

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Buton

e-mail : bahtiar.tiar3012@gmail.com

Article History:

Received: 02-01-2023

Revised: 24-01-2023

Accepted: 13-02-2023

Keywords:

Nelayan, Rumpon,
Pengelolaan, Kebijakan

Abstract: Ketergantungan nelayan terhadap rumpon sebagai alat bantu penangkapan, menjadi salah satu bukti bahwa rumpon sangat efisien dalam membantu nelayan dalam melakukan operasi penangkapan ikan di Kabupaten Buton Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat dalam upaya pengelolaan Rumpon sebagai Alat Bantu Penangkapan ikan dan memberikan gambaran tentang strategi dan kebijakan untuk pengelolaan rumpon sebagai daerah penangkapan ikan. Metode pengumpulan data dengan pendekatan deskripsi studi kasus dan untuk menganalisis model dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT Alternatif Strategi analisis menjelaskan bahwa strategi yang sesuai untuk pengelolaan sebaran rumpon di Buton Selatan yaitu strategi SO (Strengths-Opportunities) nilai total skor matrik IFE (1,332) dan EFE (0,976) dengan 3 (tiga) strategi yaitu sosialisasi Permen KP NO. 26 Tahun 2014 tentang Rumpon, perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan rumpon dan peningkatan peran KUB dan Penyuluh melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan rutin

PENDAHULUAN

Luas total wilayah Kabupaten Buton Selatan di dominasi oleh perairan laut yaitu 82,94 % jika dibandingkan luas daratannya hanya 17,06 %, dimana menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Buton Selatan diperkirakan luas perairannya seluas $\pm 2.478,73 \text{ km}^2$ dibandingkan luas daratan yang hanya memiliki luas $\pm 509,92 \text{ Km}^2$. Kondisi tersebut juga didukung oleh posisi perairan Buton Selatan menjadi alur migrasi berbagai jenis ikan, karena diapit oleh Laut Flores dan Laut Banda, sehingga menjadikan posisi Buton Selatan menjadi sangat strategis. Potensi dan nilai ekonomis sumberdaya ikan yang di miliki oleh Kabupaten Buton Selatan cukup tinggi, dimana umumnya nelayan di Kabupaten Buton Selatan menggunakan rumpon sebagai alat bantu penangkapan.

Efisiensi operasi penangkapan ikan telah terbukti dengan memanfaatkan rumpon, karena dapat menghemat biaya dan waktu operasi penangkapan ikan. Jika tidak menggunakan rumpon, maka nelayan membutuhkan waktu operasi penangkapan yang lama, tentunya hal ini dapat mengakibatkan biaya operasi penangkapan ikan semakin besar. Upaya

penggunaan rumpon oleh nelayan merupakan salah satu kebutuhan yang saat penting dalam hal keberhasilan operasi penangkapan ikan. Namun jika ketergantungan nelayan terhadap rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan tidak dibatasi atau diatur, dapat mengakibatkan terjadinya *over fishing*, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.19 tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, dimana Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan (JTB) serta Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) bahwa tingkat pemanfaatan SDI telah berada pada status eksploitasi penuh (*fully exploited*) dan eksploitasi berlebih (*over exploited*). Pemanfaatan rumpon khususnya oleh nelayan di Kabupaten Buton Selatan telah berlangsung cukup lama, umumnya dimanfaatkan oleh nelayan dengan berbagai macam alat tangkap sebagai alat bantu penangkapan ikan, dimana masih didominasi oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil. Permasalahan lain penempatan rumpon di perairan Buton Selatan di dominasi oleh nelayan yang berasal dari Sulawesi Selatan, jika tidak ada pengelolaan dalam penggunaannya, bukan hanya kelestarian sumberdaya ikan yang terancam namun dapat menyebabkan konflik antar sesama nelayan lokal dan nelayan dari daerah lain. Karena adanya klaim kepemilikan daerah tangkapan ikan terhadap penempatan rumpon pada suatu perairan. Menurut Wudianto, et.al (2019) bahwa semakin banyaknya rumpon yang dipasang serta penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan tidak selektif dapat menimbulkan masalah terkait keberadaan sumber daya ikan sehingga dapat memicu upaya penangkapan yang berlebih, yang dapat mengakibatkan *over fishing*, serta masalah sosial berupa konflik antar nelayan pemanfaat rumpon. Sehingga diperlukan upaya nyata dalam hal pengelolaan Rumpon sesuai dengan Permen KP yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat dalam upaya pengelolaan Rumpon sebagai Alat Bantu Penangkapan ikan dan memberikan gambaran tentang strategi dan kebijakan untuk pengelolaan rumpon sebagai daerah penangkapan ikan. Manfaat dari penelitian ini adalah sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah/provinsi untuk menentukan strategi pengelolaan rumpon sebagai Alat bantu penangkapan yang berkelanjutan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskripsi studi kasus yaitu studi intensif dan terperinci mengenai objek yang dilakukan dengan berpedoman pada kuisisioner dan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang tidak tercantum dalam kuisisioner. Metode ini dilakukan melalui survey lapangan dalam pengumpulan data.

Untuk menganalisis model pengelolaan daerah sebaran rumpon sebagai penangkapan ikan yang sesuai untuk dapat diterapkan di perairan Buton Selatan dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT (Ernaningsih, 2012). Analisis SWOT didasarkan pada logika yang bisa memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan bisa meminimalkan ancaman (threats) dan kelemahan (Weaknesses).

HASIL DAN PEMBAHASAN**Analisis Strategi Pengelolaan Rumpon
Responden**

Total jumlah nelayan di Kabupaten Buton Selatan sebanyak 8.760 nelayan. Jumlah nelayan dijadikan jumlah populasi untuk pengambilan jumlah sampel. Berdasarkan perhitungan persamaan Slovin diperoleh jumlah responden adalah 100 orang. Pada kegiatan pengambilan data di lapangan, penulis memperoleh jumlah responden yaitu sebanyak 125 orang. Untuk responden nelayan sebanyak 100 orang, petugas aparaturnya Pemerintah Daerah berjumlah 23 orang, dan responden tenaga pakar berjumlah 2 orang.

Aspek Dukungan dan Strategi Pengelolaan

Masing-masing responden memberikan pilihan pada setiap pernyataan dengan pilihan TP (Tidak Penting), CP (Cukup Penting), P (Penting), dan SP (Sangat Penting). Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 11. Aspek dukungan dan strategi pengelolaan sebaran rumpon

Aspek	Aspek dukungan dan strategi		Nilai			
			TP (1)	CP (2)	P (3)	SP (4)
SDM	A1	Pembentukan kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan rumpon	4	3	85	33
	A2	Pembinaan rutin terhadap KUB nelayan rumpon	5	20	62	38
	A3	Kegiatan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan	8	30	75	12
	A4	Penempatan penyuluh perikanan disetiap kecamatan	3	37	52	33
	A5	Sosialisai Permen KP no. 26 Tahun 2014 tentang rumpon	11	6	37	71
SDI	A6	Data potensi sumberdaya ikan pelagis kecil	-	45	32	48
	A7	Peta perkiraan daerah penangkapan ikan	3	27	55	40
SDI	A8	Meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir terhadap kelestarian SDI dan habitatnya	2	33	64	26
	A9	Pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Bom, Pukat)	-	21	35	69
Infrastruktur dan teknologi	A10	Pembangunan sarana tempat pendaratan ikan	-	12	23	90
	A11	Pengembangan sarana penanganan ikan (<i>coolstroege</i>)	-	14	28	83

	A12	Peta sebaran rumpon sebagai media informasi tentang penempatan rumpon diperairan Buton Selatan	5	18	51	50
	A13	Penggunaan alat-alat bantu dalam operasional penangkapan ikan (Rumpon, GPS, Fish Finder, kompas, peta laut)	-	14	75	36
Kelembagaan	A14	Meningkatkan kerjasama antara nelayan dan pengusaha rumpon dalam pemanfaatan rumpon	12	36	48	29
	A15	Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan Rumpon	4	21	57	43
	A16	Forum komunikasi antara stakeholder dalam pengelolaan rumpon	15	23	43	44
	A17	Peran pemerintah dalam pengelolaan sebaran rumpon	-	28	31	66
Pengaturan dalam usaha pengelolaan rumpon	A18	Penetapan zona pengelolaan sebaran rumpon	4	27	49	45
	A19	Pembatasan jumlah kepemilikan rumpon oleh nelayan lokal dan nelayan pendatang	5	10	51	59
	A20	Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan rumpon diperairan Buton Selatan	14	23	47	41
	A21	Pengaturan sebaran rumpon sesuai aturan yang berlaku	17	34	45	29
	A22	Data kepemilikan jumlah dan posisi/titik koordinat rumpon	3	25	57	40
	A23	Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan rumpon	11	18	59	37

Aspek dukungan dan strategi pengelolaan sebaran rumpon

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat aspek untuk mendukung pengelolan rumpon di perairan Buton Selatan maka responden memberikan pilihan pada setiap pernyataan dengan pilihan Tidak Penting (TP), Cukup Penting (CP), Penting (P), dan Sangat Penting (SP). Dari hasil wawancara terhadap responden, diperoleh hasil dari masing-masing aspek yaitu :

1. Aspek Sumberdaya Manusia, pentingnya sosialisai Permen KP tentang rumpon. Hal ini dapat menjadi salah satu langkah awal untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya penggunaan rumpon sesuai aturan yang berlaku

2. Aspek Sumberdaya ikan, Pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (bom, pukot). Hal ini dapat memberikan kesadaran nelayan terhadap pentingnya kelestarian Sumberdaya Ikan dan habitatnya dengan cara menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Hal ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelestarian Sumberdaya Ikan khususnya di daerah rumpon.
3. Aspek infrastruktur dan teknologi, Pembangunan sarana tempat pendaratan ikan. Menjadi aspek yang sangat penting dan dibutuhkan oleh nelayan dalam mendukung pengelolaan Sumberdaya ikan.
4. Aspek kelembagaan, Peran pemerintah dalam pengelolaan sebaran rumpon menjadi aspek yang sangat penting karena pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan regulator dalam pengelolaan rumpon.
5. Aspek pengaturan dalam usaha penangkapan ikan, Pembatasan jumlah kepemilikan rumpon oleh nelayan lokal dan nelayan pendatang dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan rumpon. Menjadi aspek yang sangat penting dalam hal pengaturan sebaran rumpon yang ada sekarang untuk menghindari terjadi konflik antar sesama nelayan dalam pemanfaatan rumpon.

Analisis *SWOT*

Faktor Eksternal dan Internal

Analisis *SWOT* terhadap pengelolaan Sebaran rumpon di Buton Selatan diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan Rumpon di Kabupaten Buton Selatan. Analisis *SWOT* ini dilakukan dengan menelaah kondisi eksternal dan internal serta melakukan wawancara dengan *keyperson* yang terkait, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan komponen data yang telah ada. Faktor eksternal dan internal dari pengelolaan Sebaran Rumpon di Kabupaten Buton Selatan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Faktor eksternal dan internal pengelolaan Rumpon di Buton Selatan

I	Faktor Internal
A	Kekuatan
1	Memiliki perairan yang cukup luas.
2	Rumpon memberikan manfaat yang cukup besar terhadap nelayan
3	Adanya dukungan pemerintah daerah dengan pengadaan bantuan serta pengelolaan rumpon
4	Adanya kelompok Usaha Bersama nelayan rumpon (KUB)
5	Adanya kerjasama antara nelayan rumpon dengan pengusaha rumpon
B	Kelemahan
1	Ketergantungan nelayan terhadap rumpon
2	Belum adanya data terkait jumlah rumpon serta posisi pemasangan rumpon yang tersebar di perairan buton selatan
3	Kerjasama antara pengusaha rumpon dan nelayan rumpon belum berjalan dengan baik
4	Belum adanya pengawasan dan pengendalian terhadap rumpon yang terpasang
5	Kurangnya pengetahuan nelayan tentang adanya aturan tentang pemasangan rumpon
II	Faktor Eksternal

I	Faktor Internal
A	Peluang
1	Adanya dukungan pemerintah pusat dengan peraturan perundang-undangan
2	Lokasi Laut Buton Setalan yang strategis
3	Adanya penggunaan rumpon portable yang ramah lingkungan
4	Adanya pengusaha rumpon yang memiliki modal
5	Adanya keinginan nelayan dan pengusaha untuk melakukan pengatur sebaran rumpon
B	Ancaman
1	Adanya potensi konflik antara sesama nelayan lokal dan konflik dengan nelayan dari luar
2	Adanya kepemilikan rumpon yang tidak terbatas
3	Adanya monopoli daerah-daerah penempatan rumpon oleh nelayan dan pengusaha rumpon
4	Belum terjalinnya kerjasama yang baik antara nelayan dengan pengusaha rumpon dari luar daerah
5	Banyaknya rumpon yang dipasang berpotensi mengganggu jalur pelayaran dan jarak saling berdekatan

1. Matriks *Internal Factor Evaluation* dan *External Factor Evaluation*

Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE) digunakan untuk mengevaluasi, memberikan skor, dan menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal strategi Pengelolaan Sebaran Rumpon. Penentuan bobot agar menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dilakukan dengan metode paired comparison, sehingga akan memperoleh bobot dari masing-masing variabel internal beserta nilai rating terhadap faktor. Hasil skoring matriks Internal Faktor Evaluatin (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE) dapat dilihat pada tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Skoring Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
			(1x2)
	1	2	3
Strengths (Kekuatan)			
S1 Memiliki perairan laut yang cukup luas	0,125	4	0,501
S2 Rumpon memberikan manfaat yang cukup besar terhadap nelayan	0,123	4	0,490
S3 Adanya dukungan pemerintah daerah dengan pengadaan bantuan rumpon	0,117	4	0,469
S4 Terdapat kelompok-kelompok nelayan rumpon	0,117	4	0,469
S5 Terjalinnnya Kerjasama yang baik antara nelayan rumpon	0,114	4	0,458
Total			2,387
Weakness (Kelemahan)			
W1 Ketergantungan nelayan terhadap rumpon	0,084	3	0,290

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor (1x2)
	1	2	3
W2 Belum adanya data terkait jumlah rumpon serta posisi pemasangan rumpon yang tersebar di perairan buton selatan	0,082	3	0,282
W3 Kerjasama antara pengusaha rumpon dan nelayan rumpon belum berjalan dengan baik	0,082	3	0,275
W4 Belum adanya pengawasan dan pengendalian terhadap rumpon yang terpasang	0,076	2	0,244
W5 Kurangnya pengetahuan nelayan tentang adanya aturan tentang pemasangan rumpon	0,079	2	0,237
Total	1.00		1,054

Tabel 4. Skoring Matriks External Factor Evaluation (EFE)

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor (1x2)
	1	2	3
Opportunities (Peluang)			
O1 Adanya dukungan pemerintah pusat dengan peraturan perundang-undangan	0,125	3	0,375
O2 Lokasi Laut Buton Setalan yang strategis	0,122	3	0,366
O3 Adanya penggunaan rumpon portable yang ramah lingkungan	0,116	3	0,348
O4 Adanya pengusaha rumpon yang memiliki modal	0,119	3	0,357
O5 Adanya keinginan nelayan dan pengusaha untuk melakukan pengatur sebaran rumpon	0,113	3	0,339
Total			1,786
Threats (Ancaman)			
T1 Adanya potensi konflik antara sesama nelayan lokal dan konflik dengan nelayan dari luar	0,086	2	0,173
T2 Adanya kepemilikan rumpon yang tidak terbatas	0,071	2	0,143
T3 Adanya monopoli daerah penempatan rumpon oleh nelayan dan pengusaha rumpon	0,080	2	0,161
T4 Belum terjalannya kerjasama yang baik antara nelayan dengan pengusaha rumpon dari luar daerah	0,083	2	0,167
T5 Banyaknya rumpon yang dipasang berpotensi mengganggu jalur pelayaran dan jarak saling berdekatan	0,083	2	0,167
Total	1.00		0,810

Sumber: Hasil Penelitian (2019)

Berdasarkan Skoring Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *Matriks External Factor Evaluation* (EFE), faktor *strengths* (kekuatan) memiliki total skor sebesar 2,387. Buton

Selatan memiliki perairan yang luas merupakan kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Selatan yang terkait dengan pengelolaan Sebaran Rumpon dengan skor sebesar 0,501. Hal ini dikarenakan dari luas total wilayah Kabupaten Buton Selatan 83 % merupakan laut. Sedangkan *strengths* (kekuatan) yang pengaruhnya paling kecil adalah adanya kerjasama antara nelayan rumpon dengan pengusaha rumpon dengan skor sebesar 0,458. Adapun untuk faktor *weakness* (kelemahan) memiliki total skor sebesar 1,054. Ketergantungan nelayan terhadap rumpon merupakan kelemahan terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Buton Selatan yang terkait dengan pengelolaan sebaran rumpon dengan skor sebesar 0,253. Nelayan telah menjadikan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan yang paling efektif, selain itu adanya kepastian daerah penangkapan dengan adanya rumpon dapat menghemat bahan bakar dan efektif menghemat waktu operasi penangkapan. Sedangkan *weakness* (kelemahan) yang pengaruhnya paling kecil adalah belum adanya pengawasan dan pengendalian terhadap rumpon yang terpasang dengan skor 0,153.

Faktor *Opportunities* (peluang) memiliki total skor sebesar 1,786. Adanya dukungan pemerintah pusat dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rumpon. Peranan pemerintah pusat dalam pengelolaan rumpon telah dilakukan sejak tahun 1997 dengan mengeluarkan peraturan SK Mentan No 51/Kpts/IK.250/1/1997 tentang sistem penyebaran rumpon, kemudian direvisi melalui Kepmen KP.No.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon yang kemudian disempurnakan lagi dengan Permen Kelautan dan Perikanan No. 26/Permen-KP/2014 tentang rumpon merupakan peluang terbesar yang dimiliki Kabupaten Buton Selatan yang terkait dengan Pengelolaan Sebaran rumpon dengan skor sebesar 0,375. Sedangkan *opportunities* (peluang) yang pengaruhnya paling kecil adalah adanya pengusaha rumpon yang memiliki modal dengan skor sebesar 0,339. Adapun untuk faktor *threat* (ancaman) memiliki total skor sebesar 0,810. Adanya kepemilikan rumpon yang tidak terbatas merupakan ancaman terbesar yang dimiliki Buton Selatan yang terkait dengan Pengelolaan Sebaran Rumpon dengan skor sebesar 0,173. Hal ini dikarenakan banyaknya rumpon yang tersebar tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan *threat* (ancaman) yang pengaruhnya paling kecil adalah adanya potensi konflik antara sesama nelayan lokal dan konflik dengan nelayan dari luar di Perairan Laut Buton Selatan dengan skor sebesar 0,143.

1. Analisis Alternatif Strategi (*Alternative Strategy Analysis*).

Berdasarkan nilai total skor matrik IFE (1,332) dan EFE (0,976) dapat digambarkan dalam bentuk diagram analisis SWOT. Hasil diagram analisis SWOT menjelaskan bahwa strategi yang sesuai untuk pengelolaan sebaran rumpon di Kabupaten Buton Selatan yaitu strategi SO (*Strengths-Opportunities*), berdasarkan analisis faktor internal dan faktor eksternal serta analisis dengan matrik space SWOT diatas maka disusun berbagai alternatif strategi yang tersedia bagi pengelolaan sebaran rumpon di Kabupaten Buton Selatan dengan menggunakan analisis matriks SWOT.

Tabel 52.Matriks Analisis SWOT

<p>EFAS</p>	<p>IFAS</p> <p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buton Selatan memiliki perairan yang cukup luas. 2. Rumpon memberikan manfaat yang cukup besar terhadap nelayan 3. Adanya dukungan pemerintah daerah dengan pengadaan bantuan serta pengelolaan rumpon 4. Adanya Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan rumpon dan penyuluh disetiap kecamatan 5. Adanya kerjasama antara nelayan rumpon dengan pengusaha rumpon 	<p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketergantungan nelayan terhadap rumpon. 2. Belum adanya data terkait jumlah rumpon serta posisi pemasangan rumpon yang tersebar di perairan buton selatan 3. Kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha rumpon dan nelayan rumpon belum berjalan dengan baik 4. Belum adanya pengawasan dan pengendalian terhadap rumpon yang terpasang 5. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran nelayan tentang pentingnya pengaturan pemasangan rumpon
<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan pemerintah pusat dengan peraturan perundang-undangan 2. Lokasi laut Buton Setalan yang strategis 3. Adanya penggunaan rumpon portable yang ramah lingkungan 4. Adanya pengusaha rumpon yang memiliki modal 5. Adanya keinginan nelayan dan pengusaha untuk melakukan pengatur sebaran rumpon 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Permen KP NO. 26 Tahun 2014 tentang Rumpon (S1, S2, S3, S4, O1, O2, O5) 2. Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan rumpon (S1, S2, S3, O2, O5) 3. Peningkatan peran KUB dan Penyuluh melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan rutin (S2,S3,S4,S5,O4,O5) 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi penggunaan rumpon portable kepada nelayan dan pengusaha rumpon (W1, W3, O3, O4,O5) 2. Perlu adanya pembinaan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran nelayan dan pengusaha dalam kerjasama pengelolaan rumpon (W1,W3,W5,O4,O5)
<p>Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya potensi konflik antara sesama nelayan lokal dan 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya peraturan daerah yang jelas dalam mengatur pemasangan 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pengaturan dan Pendataan ulang terhadap kepemilikan, jumlah dan posisi

konflik dengan nelayan dari luar	dan pemanfaatan rumpon (S1,S3,T2,T4,T5)	pemasangan rumpon (W2, W4,T2,T3,T4,T5)
2. Adanya kepemilikan rumpon yang tidak terbatas	2. Penetapan zona pengelolaan sebaran rumpon (S1, S3, T3, T4, T5)	2. Meningkatkan koordinasi antar sector dalam upaya pengelolaan rumpon guna menghindari konflik antar nelayan (W3, W4, T1, T3, T4, T5)
3. Adanya monopoli daerah-daerah penempatan rumpon oleh nelayan dan pengusaha rumpon	3. Sosialisasi Permen KP No.71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan (S1,S4,T3,T5)	
4. Banyaknya pemasangan rumpon yang berpotensi mengganggu jalur mingrasi ikan		
5. Banyaknya rumpon yang dipasang SIPR dan identitas yang berpotensi mengganggu jalur pelayaran.		

Hasil penelitian (2019)

2. Penentuan Prioritas Strategi

Berdasarkan matriks SWOT tabel 6, diperoleh 10 (sepuluh) alternatif Pengelolaan sebaran rumpon di Kabupaten Buton Selatan. Dari hasil matrik SWOT diatas menunjukkan bahwa adanya beberapa alternatif strategi dalam pengelolaan sebaran rumpon di Buton Selatan, untuk dapat meminimalkan masalah-masalah internal yang ada sehingga dapat merebut peluang eksternal dengan baik.

Tabel 63. Penentuan Prioritas Strategi

No	Strategi	Keterkaitan	Skor	Ranking
1	Sosialisasi Permen KP NO. 26 Tahun 2014 tentang Rumpon	S1,S2,S3,S4,S5,O1,O2,O5	3.411	1
2	Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan rumpon	S1, S2, S3, O2, O5	2.107	3
3	Peningkatan peran KUB dan Penyuluh melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan rutin	S2,S3,S4,S5,O4,O5	2.386	2
4	Sosialisasi penggunaan rumpon Portable kepada Nelayan dan Pengusaha Rumpon	W1,W3,O3,O4,O5	1.608	4
5	Perlu adanya pembinaan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran nelayan dan pengusaha	W1,W3,W5,O4,O5	1.427	7

No	Strategi	Keterkaitan	Skor	Ranking
	dalam kerjasama penggunaan rumpon			
6	Perlu adanya peraturan daerah yang jelas dalam mengatur pemasangan dan pemanfaatan rumpon	S1,S3,T2,T4,T5	1.724	5
7	Penetapan zona pengelolaan sebaran rumpon	S1,S3,T3,T4,T5	1.692	6
8	Sosialisasi Permen KP No.71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan	S1,S4,T3,T5	1.435	8
9	Melakukan Pengaturan dan Pendataan ulang terhadap kepemilikan, jumlah dan posisi pemasangan rumpon	W2,W4,T2,T3,T4,T5	1.626	9
10	Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam upaya pengelolaan rumpon guna menghindari konflik antar nelayan	W3,W4, T1,T3,T4	1.610	10

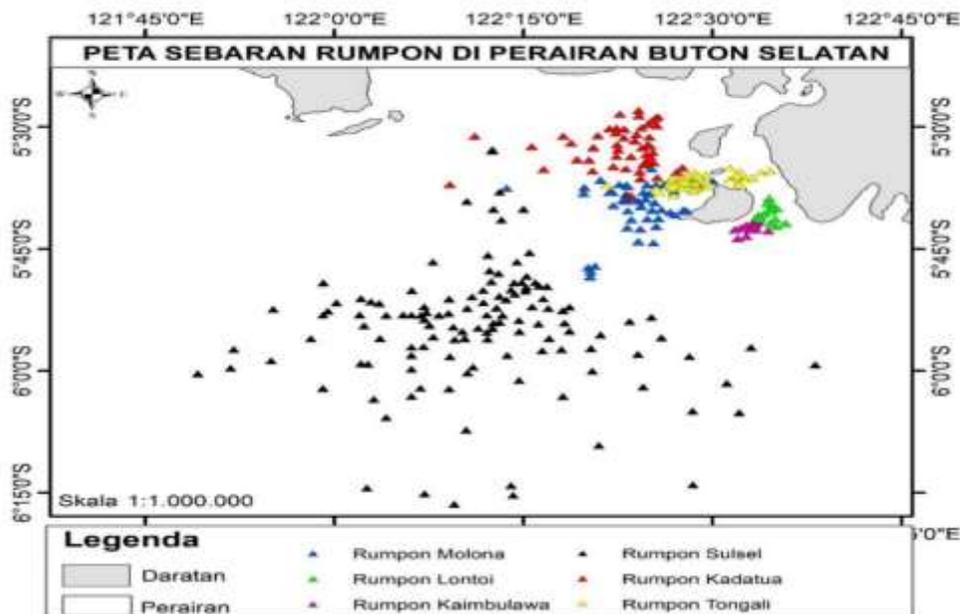
Alternatif strategi pengelolaan diperoleh dengan membandingkan antara faktor lingkungan eksternal dan faktor lingkungan internal (Wijayanto *et al*, 2013). Alternatif strategi yang digunakan adalah SO (*Strengths-Opportunities*), ST (*Strengths-Threats*), WO (*Weaknesses-Opportunities*), dan WT (*Weaknesses-Threats*).

Berikut 10 (sepuluh) alternatif strategi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan sosialisasi Permen KP Nomor 26 tahun 2014 tentang rumpon sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan tentang aturan pemanfaatan rumpon di perairan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran rumpon di Buton Selatan semua titik lokasi rumpon memiliki jarak antara rumpon yaitu kurang dari 10 mil laut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Permen-KP No. 26 Tahun 2014 tentang Rumpon pada pasal 12 Ayat 1d menjelaskan untuk jarak antara rumpon tidak boleh kurang dari 10 mil laut. Jadi melalui sosialisasi Permen KP no 26 Tahun 2014 diharapkan nelayan dapat memahami tentang aturan pemanfaatan rumpon yang baik dan benar.
2. Perlu adanya peningkatan peran KUB nelayan rumpon dan penyuluh melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dan pengusaha dalam memanfaatkan rumpon. Melalui peran penyuluh-penyuluh yang terdapat disetiap kecamatan di Kabupaten Buton Selatan kepada nelayan-nelayan. Peningkatan peran KUB dan penyuluh dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi nelayan dan pengusaha rumpon diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam bagi nelayan dan pengusaha yang ada di Buton Selatan tentang pentingnya pengelolaan rumpon, prinsip kerja rumpon, cara membuat rumpon, serta sistem regulasi pengelolaan rumpon. Menurut Nadia *et.al* (2015) bahwa dalam suatu industri perikanan tangkap diperlukan target produksi yang terus dikejar dan sistem akuntansi pengelolaan

keuangan yang konsisten dan tertib, maka manajemen dan komitmen dilakukan secara terus menerus. Maka dari itu kelompok nelayan dan pengusaha perlu dibekali ilmu pengetahuan yang cukup.

3. Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan rumpon agar dalam penempatan rumpon yang baru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan rumpon, penetapan zona pengelolaan sebaran rumpon, dari banyak rumpon yang tersebar di perairan Buton Selatan, banyak rumpon yang penempatannya kurang dari 10 mill laut,



Gambar 1. Peta Sebaran Rumpon di perairan Buton Selatan (Hamar et.al,2020)

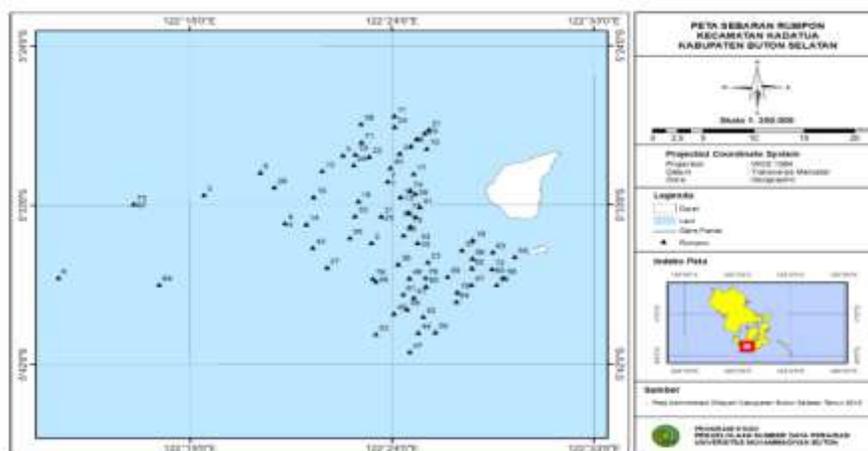
Dari peta di atas dapat dilihat jarak rumpon dengan daratan/pesisir adalah banyak yang tersebar di daerah 2 – 10 mil serta jarak antara rumpon juga berdekatan, dari penyebaran rumpon ini terdapat ketidaksesuaian antara pola penempatan rumpon yang digunakan oleh nelayan di Buton Selatan dengan ketentuan konsesi tata laksana perikanan yang bertanggung jawab terkait dengan penggunaan rumpon. Maka diperlukan adanya upaya dari pihak yang pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan rumpon sesuai dengan regulasi yang telah berlaku.

Menurut Wudianto, *et al* (2019) bahwa pemasangan rumpon harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dengan melakukan pendaftaran ulang guna penertiban pemasangan rumpon yang terpasang di suatu perairan

4. Perlu sosialisasi penggunaan rumpon portable kepada nelayan dan pengusaha rumpon diharapkan agar nelayan dapat mengurangi kerugian ketergantungan terhadap rumpon tetap dan dapat beralih menggunakan rumpon portable yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan rumpon tetap. Nelayan Buton Selatan saat ini masih mengandalkan penggunaan rumpon tetap untuk membantu operasi penangkapan ikan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi penggunaan rumpon portable merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh nelayan rumpon, karena keunggulan rumpon portable ini penempatannya dilakukan saat akan diadakan operasi penangkapan ikan,

sehingga saat tidak digunakan operasi penangkapan rumpon portable ini dapat dibawa pulang kembali oleh nelayan. Menurut Yusfandayani *et al.* (2013) bahwa rumpon portable memiliki keunggulan dibandingkan rumpon menetap yaitu pada saat rumpon tidak digunakan lagi maka dapat dipindahkan dan saat akan digunakan maka rumpon portable dapat di pasang lagi di perairan untuk melakukan operasi penangkapan ikan.

5. Perlu adanya peraturan daerah (PERDA) yang jelas dalam mengatur pemasangan dan pemanfaatan rumpon sebagai peran pemerintah dalam hal pengelolaan sebaran rumpon. Dengan adanya PERDA diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan pengendalian jumlah rumpon yang banyak. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah beberapa kali mengeluarkan ijin pemasangan rumpon. Namun kenyataan yang ada rumpon yang terpasang di perairan laut Indonesia jauh melebihi jumlah yang diijinkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melindungi kelestarian sumberdaya ikan maka dikeluarkan kebijakan mengenai rumpon dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PERMEN KP No. 26 tahun 2014 tentang Rumpon. Dengan adanya permen ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang secara khusus mengatur penggunaan rumpon di Buton Selatan.
6. Perlu adanya penetapan zona pengelolaan sebaran rumpon sebagai upaya untuk mengatur penempatan rumpon sesuai dengan wilayah penempatannya. Diharapkan dengan adanya penetapan zona pengelolaan rumpon dapat menjadi solusi terhadap kepadatan rumpon diperairan Buton selatan, sehingga dapat dilakukan pengaturan sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Perlu adanya pembinaan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran nelayan dan pengusaha dalam hal menjalin kerjasama untuk memanfaatkan rumpon secara bersama dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi jumlah penyebaran rumpon serta dapat meningkatkan kesadaran nelayan dan pengusaha agar mau melakukan kerjasama memanfaatkan rumpon yang berkelanjutan dengan penerapan bagi hasil (gambar 2). Menurut Wudianto, et.al (2019) bahwa dengan adanya bantuan pemerintah yang diberikan melalui suatu program bantuan rumpon berhasil meningkatkan penghasilan nelayan



Gambar. 2. Rumpon yang digunakan di Kecamatan Kadatua, Buton Selatan (Hamar et.al, 2021)

8. Perlu adanya Sosialisasi Permen KP No.71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan diharapkan nelayan dapat memahami tentang jalur penangkapan dan penempatan alat tangkap. Sesuai aturan yang berlaku penempatan rumpon pada jalur Penangkapan ikan III diatas 12 mill laut (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) untuk Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk rumpon yang dipasang di jalur penangkapan ikan II (wilayah 4 -12 Mill Laut) diterbitkan oleh Gubernur, sedangkan untuk rumpon yang dipasang di jalur penangkapan ikan I (wilayah 2-4 Mill Laut) SIPR dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.
9. Melakukan Pengaturan dan Pendataan ulang terhadap kepemilikan, jumlah dan posisi pemasangan rumpon sebagai upaya untuk memperoleh data base yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam upaya pengelolaan sebaran rumpon. Melalui pengaturan dan pendataan ulang ini diharapkan pemerintah memperoleh data dan informasi mengenai posisi dan jumlah rumpon yang dipasang oleh nelayan maupun pengusaha yang selama ini memanfaatkan rumpon sebagai alat bantu penangkapan. Tidak adanya data dan informasi yang akurat mengenai rumpon menyebabkan keberadaan rumpon di perairan Buton Selatan tidak mudah untuk dikontrol, jarak antara rumpon juga saling berdekatan dengan jarak kurang dari 10 mil laut. Menurut Hargiyatno *et al.* (2015) bahwa rumpon laut dalam yang dipasang oleh nelayan sebagai alat bantu penangkapan ikan memiliki jarak antara rumpon saling berdekatan, hampir semua rumpon dipasang dengan jarak kurang dari 10 nautical mil.
10. Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam upaya pengelolaan rumpon guna menghindari konflik antar nelayan hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antar sektor dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perairan. Menurut Wudianto, et al (2019) bahwa banyak operasi penangkapan ikan memanfaatkan rumpon dapat menimbulkan konflik sosial antar nelayan yang memanfaatkan rumpon. Sehingga dibutuhkan upaya bersama antar sektor untuk menghindari terjadinya konflik antar nelayan pengguna rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan strategi pengelolaan rumpon di perairan laut Kabupaten Buton Selatan yaitu : a) Perlu adanya Sosialisasi Permen KP NO. 26 Tahun 2014 tentang Rumpon, b) Meningkatkan peran KUB dan penyuluh dalam hal pengelolaan sebaran rumpon, dan c) adanya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sebaran rumpon.

SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang diperoleh, diperlukan penelitian secara ilmiah tentang zona pengelolaan rumpon berdasarkan aspek ekologi, sosial dan ekonomi sehingga dapat direkomendasikan penetapan zona pengelolaan rumpon di Perairan Buton Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hamar B, Bone AH. 2021. Utilization of FAD distribution in south buton waters as a fishing app by purse sein fishermen in Kadatua District, Selatan Buton Regency. *J Asian Mult Res Soc Sci Stud* 2 (3): 125-131. DOI: 10.47616/jamrems.v2i3.165.
- [2] Hamar B, Fitri ADP, Sulardiono B. 2020. Study of Biological Factors of Flying Fish (*Decapterus Spp*) Results of Purse Seine Ship Capacity in Waters of South Buton Regency, Southeast Sulawesi. *South Asian Research Journal of Agriculture and Fisheries (South Asian Res J Agri Fish)*. Vol. 2(2) : 25-30.
- [3] Hargiyatno, I. T., Anggawangsa, R. F., Samusamu, A. S., & Widodo, A. A. (2015). Distribusi dan jarak pemasangan rumpon laut dalam upaya pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan (studi kasus di Kendari, Maumere dan Pelabuhanratu). *Prosiding Simposium Nasional Pengelolaan Perikanan Tuna Berkelanjutan*. Bali, 10-11 Desember 2014. WWF-KKP: 465-473.
- [4] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2022. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- [5] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Kelautan Republik Indonesia Nomor. 71/Permen-KP/2016. [Internet]. [diunduh pada 30 Januari 2018].
- [6] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon. [Internet]. [diunduh pada 30 Januari 2018].
- [7] Nadia, L.A.R., Abdullah dan A. Takwir. 2015. Pengembangan Teknologi Rumpon Konservasi Terpadu dan Berkelanjutan Menuju Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Basis Pangan Ikan dan Percontohan Ekowisata Rumpon Nasional. *Laporan Akhir Penelitian Insentif Riset Sinas Tahun 2015*. Universitas Halu Oleo, Kendari.
- [8] Yusfiandayani R, Jaya I, Baskoro MS. 2013. Uji Coba Penangkapan pada Rumpon Portable di Perairan Palabuhanratu. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 4(1): 89-98.
- [9] Wijayanto. D, D. M. Nuriasih, M. N. Huda dan C. R. K. Pamuntjah. 2013. Strategi Pengembangan Pariwisata Mangrove Di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida. *Jurnal Saintek Perikanan*., 8(2): 25-32.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN